



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLKAR
PROVINSI DKI JAKARTA**

“Keberhasilan seorang kader di parlemen maupun di struktur partai tidak lahir secara instan, melainkan terbentuk melalui proses yang panjang. Seperti logo Partai Golkar yakni Pohon beringin itu rindang, pohonnya bagus, tapi jauh lebih dari itu adalah akarnya yang kuat. Selain itu, Partai Golkar menyuarakan dan meyakinkan kepada rakyat menanyakan tentang apa yang akan menjadi program-program kita ke depan. Kalau kemarin slogan Partai Golkar yaitu 'suara Golkar, suara rakyat', coba kita balik menjadi 'suara rakyat, suara Golkar'. Jadi apa yang dipikirkan oleh rakyat, itu yang akan diperjuangkan oleh Partai Golkar.”

BAHLIL LAHADALIA

Ketua Umum DPP Partai GOLKAR





“Karena Partai Golkar ini simbolnya pohon beringin, filosofi pohon beringin itu memberi banyak perlindungan dan memberi banyak manfaat, maka sekarang Golkar harus menjamin orang bisa hidup sejahtera. Pohon beringin juga menjadi tempat berteduh bagi semua yang membutuhkan. Pohon beringin mampu tahan dari tsunami, angin puting beliung, ataupun jika diseruduk, tapi pada akhirnya burung-burung buat kandang di tempat pohon beringin. Selain itu, ada juga padi dan kapas, yang melambangkan kesejahteraan sandang dan papan. Jadi kader Golkar harus siap menyejahterakan rakyat, jangan demi perut sendiri.”

AHMED ZAKI ISKANDAR

Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta

FILOSOFI LOGO PARTAI GOLKAR



Makna pohon beringin dalam Pancasila adalah simbol kehidupan, persatuan, dan keberlanjutan. Sebagai sebuah simbol, pohon beringin mengajarkan pentingnya persatuan yang kokoh di tengah keberagaman, menjaga kelestarian alam, dan menghargai kehidupan bersama. Nilai-nilai yang terkandung dalam pohon beringin sangat relevan dengan filosofi yang ingin dibangun dalam negara Indonesia, yakni negara yang adil, makmur, dan harmonis. Maka dari itu, pohon beringin bukan hanya sekadar simbol visual, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menginspirasi untuk terus menjaga persatuan dan keberlanjutan dalam segala aspek kehidupan.

VISI MISI PARTAI GOLKAR

Visi Partai GOLKAR :

1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berahklak mulia.
2. Berkesadaran hukum dan lingkungan.
3. menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Bermartabat dalam pergaulan dunia.

Misi Partai GOLKAR :

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

FRAKSI GOLKAR DPRD PROVINSI DKI JAKARTA



BASRI BACO

Wakil Ketua DPRD / Penasihat Fraksi GOLKAR



JUDISTIRA HERMAWAN

Ketua Fraksi GOLKAR



RAMLY HI MUHAMAD
Wakil Ketua I



SARDI WAHAB SADRY
Wakil Ketua II



ANDRI SANTOSA
Sekretaris



DADIYONO
Bendahara



DIMAZ RADITYA
Anggota



ALIA NOORAYU LAKSONO
Anggota



FARAH SAVIRA
Anggota



SYAFI FABIO DJOHAN
Anggota

PERJUANGAN FRAKSI GOLKAR JAKARTA

JANUARI



FEBRUARI



MARET



APRIL

TEROPONGNEWS Rabu, 9 September 2025

Legislator Golkar Dorong Pemprov Bentuk Satgas Cegah Tawuran di Jakarta

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Farah Savira mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengundang beberapa pihak membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mencegah aksi tawuran yang kerap terjadi di berbagai wilayah Jakarta. Apalagi, mayoritas para pelaku tawuran kebanyakan dari kalangan remaja yang notabene masih duduk di bangku sekolah.

"Karena kita lihat, kita enggak bisa pungkiri, pengawasannya memang kurang," kata Farah saat ditemui teropongnews di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Farah juga menyoroti perilaku dengan penertiban atau pencegahan maupun pasca tawuran. Menurut dia, harus ada sinergi antara Pemprov DKI dan pihak sekolah untuk tindakan riil dan konkret kepada pelaku tawuran, khususnya bagi anak-anak yang masih berusia remaja.

MEI

Komisi C DPRD DKI Sarankan UPT Parkir Dibubarkan & Dilelang ke Swasta

Ant Khabarmak - khabarmak
Kamis, 15 Mei 2025 12:27 WIB

Jakarta - Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimas Raditya menyoroti persoalan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta. Dimas menyarankan Unit Pelaksana Teknis (UPT) parkir dilelang ke pihak swasta jika tidak bisa diubah.

"Kalau enggak perform dan enggak ada terobosan, Komisi C menyarankan supaya UPT parkir dibubarkan dan dilelang ke swasta saja karena anggaran pendapatan daerah yang bocor kalau kita hitung sampai angka trilyunan rupiah, kan parah sekali ya? Jadi intinya kalau UPT Parkir enggak perform ya bubarin saja lelang ke swasta biar enak kontrolnya," ungkap Dimas dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

JUNI

Nilai Transaksi JFK 2025 Turun Rp200 miliar, DPRD DKI Yakin Tembus Rp 8 triliun Jika Digelar Sebulan

Perdana itu karena waktu yang selama satu bulan full selama 30 hari, kemarin kan kalau nggak salah cuma 2 minggu atau 21 hari," kata Baco saat ditemui di kantornya pada Senin (14/7/2025).

Faktor kedua, lanjut Baco, adalah maknanya daya beli masyarakat, karena perekonomian masyarakat sekarang belum cenderung baik.

Selain bersikap prihatin, pemerintah daerah juga harus memarah perhatian besar dengan mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

"Seperti kita ketahui memang kondisi ekonomi kita hari ini, tidak terlalu baik-baik saja. Artinya kita harus prihatin dan tetap melakukan efisiensi di mana, dan pemerintah pusat hingga daerah ini yang mungkin menjadi faktor utama," jelas Baco.

JULI

Home - News - Metropolitan

61 Ribu Siswa Jakarta Belum Nikmati Sekolah Gratis

Netta, Aditya Priyambodo

17 Jul 2026 17:48 WIB



Suara.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly H. Muhammad, mengungkapkan keluhan kepada DPRD RI dan DPRD RI terkait program **sekolah gratis** di Jakarta yang belum menggaransi seluruh siswa.

Hal ini diungkapkan Ramly dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan DPRD RI dan DPRD RI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/7/2026).

Menurut Ramly, masih ada 61 ribu siswa di Jakarta yang belum mendapatkan fasilitas sekolah gratis karena jumlah yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada.

"Jakarta ini, yang lulus sama saja yang dipersiapkan tidak sebanding. Masih 61 ribu siswa Jakarta yang tidak dapat sekolah gratis," ujarnya.

Pemilihan ini diambil di tengah pemotongan dana bagi hasil DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1,5 triliun oleh pemerintah pusat.

Ramly berharap pemerintah provinsi dapat membuat program DPRD provinsi untuk menentukan kebijakan anggaran yang harus dipangkas.

Pemerintah DKI Jakarta bersama DPRD sebenarnya telah menjalankan program sekolah gratis sejak 2025, dengan mencapai di 40 sekolah yang tersebar di 10 daerah pemilihan, masing-masing empat sekolah.

AGUSTUS

HOME > NEWS > MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Rp5,6 Triliun, Legislator Syafi Djohan: Bermanfaat untuk Masyarakat

Rahman Asmardika, Jurnalis-Sabtu, 22 Agustus 2026 17:03 WIB



Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Syafi Djohan mengatakan bahwa dana obligasi daerah tidak perlu ditolak jika digunakan untuk proyek produktif yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya tidak melihat obligasi sebagai sesuatu yang harus ditolak, sepanjang digunakan untuk membiayai pembangunan yang memang penting, produktif, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," ujar Syafi Djohan, Sabtu (22/8/2026).

SEPTEMBER

detikNews > Berita

DPRD DKI Sebut Tunjangan Rumah Tiap Daerah Bakal Seragam: Cari Jalan Terbaik

Brigitta Belia Permata Sari - detikNews

Jumat, 19 Sep 2025 16:25 WIB



Jakarta - Wakil DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyebut **tunjangan perumahan** yang melekat pada pimpinan dan anggota Dewan akan diseragamkan. Dia mengatakan pihaknya masih mengkaji dan mencari jalan terbaik terkait hal tersebut.

"Sedang dikaji bersama, dicari jalan yang terbaik, yang seragam rencananya. Jadi nggak Jabar sekian, Banten sekian, DKI sekian. Ini rencananya mau diseragamkan," kata Baco kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, kajian dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap proporsional dan adil bagi seluruh anggota Dewan di Indonesia. Meski begitu, Basri belum memerinci kapan kebijakan itu akan diputuskan.

OKTOBER

Pansus DPRD Tinjau Ulang Perluasan Area Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta

Tegung, Selasa, 21 Oktober 2025, 09:00 WIB

Peneliti Pusat Berkeadilan dan Pengembangan Kapasitas



TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI menggelar rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda KTR), Selasa (21/10/2025).

Dalam pembahasan rapat, beberapa aspirasi dari masyarakat diakomodir. Pansus KTR akan tetap mengacu ulang dari pembahasan sebelumnya.

"Sebagai anggota Dewan kami selalu berada di samping dengan masalah kami juga teroris ke lapangan. Tujuannya bagaimana yang terbaik hasil Raperda ini bisa diterima oleh masyarakat," kata Anggota Pansus KTR Sandy Wenas Satri.

Menurut Satri, Pansus KTR nantinya harus benar-benar berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha.

NOVEMBER

Penculikan dan Perdagangan Anak Meresahkan, DPRD Jakarta Desak Polisi Tindak Tegas

Kediri, 27 November 2025, 11:00 WIB



Sementara itu, Wakil Komisi A DPRD DKI Jakarta Aila Noorayu Laksono mengesakan kepolisian juga harus gerak cepat dalam menindak lanjut laporan orang hilang.

Selain itu, ia juga meminta agar kepolisian melakukan pembenehan sistem keamanan dan institusional, antara lain, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan kinerja dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak maupun orang hilang.

"Keselamatan warga, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, merupakan mandat yang tidak bisa ditinggalkan. Ini prioritas. DPRD akan terus mengawal," tandasnya.

DESEMBER

JAKARTA RAYA

DPRD DKI Jakarta Dorong Peningkatan PAD dari Sektor Parwisata

Sabtu 06 Des 2025, 10:10 WIB



Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimas Raditya menilai, tren tersebut sebagai sinyal positif bagi perekonomian Jakarta.

"Beberapa waktu terakhir, banyak event di Jakarta yang kembali menggalat dan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal," ujar Dimas, beberapa waktu lalu.

"Dampaknya tidak hanya dirasakan penyelenggara, tetapi juga hotel, restoran, transportasi, hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan," terang Dimas.

PROFIL PIMPINAN DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI DKI JAKARTA



AHMED ZAKI ISKANDAR

Ketua

DPD Partai GOLKAR
Provinsi DKI Jakarta
(53 Tahun)



JUDISTIRA HERMAWAN

Ketua Harian

DPD Partai GOLKAR
Provinsi DKI Jakarta
(51 Tahun)



BASRI BACO

Sekretaris

DPD Partai GOLKAR
Provinsi DKI Jakarta
(51 Tahun)



**FIRLIE HANGGODO
GANINDUTO**

Bendahara

DPD Partai GOLKAR
Provinsi DKI Jakarta
(48 Tahun)

BIDANG-BIDANG DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI DKI JAKARTA

Bidang Organisasi Kepartaian

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan

Bidang Pengabdian Masyarakat

Bidang Pemenangan Pemilu

Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan

Bidang Hukum dan HAM



Bidang Kerohanian

Bidang Media dan
Penggalangan Opini

Bidang Hubungan Ormas dan
Lembaga Politik

Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Perempuan

LOKASI

DPD PARTAI GOLKAR KAB/KOTA SE-DKI

● Kantor DPD Partai GOLKAR Kota Adm. Jakarta Pusat

Ketua : Putra Baskara Baramuli
Sekretaris : Golmer Horas Hutagol
Bendahara : Alexander Seno
Alamat : Jl. Tanah Tinggi Timur No.V No.27, RT.9/RW.2, Kel. Tanah Tinggi,
Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10540



● Kantor DPD Partai GOLKAR Kota Adm. Jakarta Utara

Plt. Ketua : Judistira Hermawan
Sekretaris : Marfuad Hasmar
Bendahara : Susilawati
Alamat : Jl. Walang Baru Raya No.6 6, RT.6/RW.12, Kel. Tugu Utara, Kec.
Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14260



📍 **Kantor DPD Partai GOLKAR Kota Adm. Jakarta Selatan**

Plt. Ketua : Ashraf Ali
Sekretaris : Posma Hutapea
Bendahara : Dinesvara Airlangga
Alamat : Jl. RM Kahfi II / Jl. Setu Babakan Rt.009/08 No.40.A Kel. Srengseng
Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630



📍 **Kantor DPD Partai GOLKAR Kota Adm. Jakarta Timur**

Ketua : Taufik Azhar
Sekretaris : Sardy Wahab Sadri
Bendahara : Agus Harta
Alamat : Jl. P. Komarudin No 27 C, RT.8/RW.4, Kel. Penggilingan, Kec.
Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13940



📍 Kantor DPD Partai GOLKAR Kota Adm. Jakarta Barat

Ketua : Richard
Sekretaris : Aloysius Fransiskus Edomeko
Bendahara : Suharto
Alamat : Jl. Anggrek Garuda D/I G No.12 Rt.005/Rw.002, Kel. Kemanggisan,
Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480



📍 Kantor DPD Partai GOLKAR Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Ketua : Wahyu Hidayat
Sekretaris : Rojiun
Bendahara : Alfiah
Alamat : Pulau Kelapa Rt. 001/02 Kel. Pulau Kelapa, Kec. Kep. Seribu Utara,
Kab. Adm. Kepulauan Seribu, 14540



MUSDA XI DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI DKI JAKARTA

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta, yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, pada Rabu 23 Juli 2025.

Turut hadir dalam Musda XI Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta ini, Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Bahlil Lahadalia, Sekertaris jendral DPP GOLKAR Sarmuji, Bendahara DPP GOLKAR Sari Yulianti, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Partai GOLKAR, dan sejumlah anggota DPR dan DPRD GOLKAR daerah pemilihan Jakarta.

Pada Musda XI Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta menetapkan Ahmed Zaki Iskandar sebagai Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta Periode 2025–2030.

Dalam sambutan pembuka, Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, Bahlil Lahadalia memberikan pujian secara terbuka kepada kepada Ketua DPD Partai GOLKAR DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar atas kinerja dan loyalitasnya dalam membesarkan partai. Menurut Ketua umum Bahlil Lahadalia, di bawah kepemimpinan Ahmed Zaki Iskandar pada periode 2020–2025, GOLKAR DKI Jakarta berhasil mencatatkan capaian signifikan, terutama dalam perolehan kursi legislatif. Tak hanya di tingkat provinsi, perolehan kursi GOLKAR dari DKI Jakarta untuk DPR RI juga meningkat.



GALERI KEGIATAN DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI DKI JAKARTA



Kegiatan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Partai GOLKAR ke-61 dan pembagian 6.100 paket sembako murah untuk memperingati penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.



Kegiatan HUT Ke- 80 Republik Indonesia DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta mengadakan Upacara dan Lomba-lomba bersama Ormas Hasta Karya dan Sayap Partai GOLKAR.



DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta mengadakan Acara Perayaan Natal 2025 dan Ucap Syukur Tahun Baru 2026 yang dihadiri oleh Kader Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta yang beragama Kristiani.

GALERI KEGIATAN DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI DKI JAKARTA



Dalam rangka memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Malam Nisfu Syaban DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta mengadakan Salat Maghrib dan Doa bersama.



DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta mengadakan Lomba-lomba yang dilaksanakan pada Bulan Ramadhan.

GALERI KEGIATAN DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI DKI JAKARTA



DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta Mengadakan Bagi Takjil Gratis selama Bulan Ramadhan.



DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta memperingati Nuzulul Quran dan Membagikan 1.500 sembako Kader GOLKAR se- DKI Jakarta.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



SURAT REKOMENDASI
Nomor : 128/REK/E-Monev2025/XII/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

**Hasil Elektronik Monitoring Dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik v
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025**

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) telah melakukan Penilaian Badan Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik pada Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang dilaksanakan selama kurun waktu dari Bulan Juli – November 2025. Jumlah partisipasi sebanyak 829 Badan Publik yang terdiri dari 22 kategori mengikuti E-Monev 2025. Hasil Penilaian akhir E-Monev 2025 Badan Publik dapat dilihat pada SK Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 001/KEP/KIDKI/XII/2025 yang tertera pada website : kip.jakarta.go.id.

Hasil Penilaian Badan Publik pada SK merupakan hasil final dan bersama surat ini KI DKI mengeluarkan Surat Rekomendasi berupa catatan penting guna untuk memberikan perbaikan kepada masing-masing Badan Publik yang belum berpredikat Informatif

I. Badan Publik

Nama Badan Publik :	DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI DKI JAKARTA
Predikat Badan Publik :	CUKUP INFORMATIF
Hasil Nilai E - Monev :	73

Berdasarkan Surat Rekomendasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 128/REK/E-Monev2025/XII/2025 tanggal 24 Februari 2026 tentang Hasil Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, dinyatakan bahwa DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta memperoleh predikat Badan Publik Cukup Informatif dengan hasil nilai E-Monev sebesar 73. Pencapaian ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas komitmen organisasi dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan semangat tersebut, DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat sistem dokumentasi dan publikasi, serta mengembangkan inovasi yang mendukung keterbukaan informasi agar di masa mendatang dapat meraih predikat yang lebih tinggi dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Sebagai badan publik yang memperoleh dukungan berupa dana bantuan politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta, DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, setiap penerimaan maupun penggunaan dana bantuan politik tersebut wajib dilaporkan secara terbuka kepada publik. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam memastikan bahwa pengelolaan dana bantuan politik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadi bagian dari komitmen DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp 3.883.537.500 yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan Tahun 2026 sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		PENDIDIKAN POLITIK			
A.	1. Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.	Pendidikan Politik Pemuda Serta Nonton Bareng Pertandingan Bola - Senin, 24 Maret 2025	1	Rp48,000,000	
		Pendidikan Politik Pemuda Serta Nonton Bareng Pertandingan Bola - Senin, 14 April 2025	1	Rp52,775,000	
		Pendidikan Politik Pemuda Serta Nonton Bareng Pertandingan Bola - Kamis, 5 Juni 2025	1	Rp45,300,000	
		Pendidikan Politik Pemuda Serta Nonton Bareng Pertandingan Bola - Selasa, 10 Juni 2025	1	Rp44,600,000	
		Talkshow Dan Seremoni "Aktivis Jakarta Log In Partai Golkar" - Senin, 14 Juli 2025	1	Rp66,100,000	
		Pendidikan Politik Pemuda Serta Nonton Bareng Pertandingan Bola - Selasa, 15 Juli 2025	1	Rp37,600,000	
		Pendidikan Politik Pemuda Serta Nonton Bareng Pertandingan Bola - Jumat, 18 Juli 2025	1	Rp49,425,000	
		Pendidikan Politik Pemuda Serta Nonton Bareng Pertandingan Bola - Senin, 21 Juli 2025	1	Rp55,500,000	
		Pembukaan dan Rapat Paripurna Musyawarah Daerah XI Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta - 23 Juli 2025	1	Rp1,679,950,000	
		Mimbar Bebas Pelajar "Suara Pelajar, Arah Masa Depan Jakarta" - Jumat, 8 Agustus 2025	1	Rp52,950,000	
		Kegiatan Pelantikan Dan Keorganisasian Pengurus MDI Se-Jakarta - Sabtu, 11 Oktober 2025	1	Rp107,280,000	
		Pendidikan Politik dan Refleksi Hari Pahlawan Nasional - Rabu, 12 November 2025	1	Rp59,625,000	
		Pendidikan Politik Pemuda Serta Nonton Bareng Pertandingan Bola - Jumat, 12 Desember 2025	1	Rp37,250,000	
		Kegiatan Pertemuan Lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik	1	318,071,446	
	SUB TOTAL		18	2,654,406,446	

B.	1. Administrasi Umum	Keperluan ATK;	1	76,333,009	
		Rapat Internal Sekretariat;	1	16,946,629	
		Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;	0		
		Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional;	0		
		Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotocopy;	1	184,822,290	Pada bukti transaksi dari penyedia (Modem Wifi 4G) senilai Rp. 676,700, terdapat kelebihan dana sebesar Rp. 49,598 yang menggunakan dana kas kantor non APBD TA 2025, sedangkan sebesar Rp. 629,102 menggunakan dana hibah APBD TA 2025.
		Sewa kantor; atau Pembayaran PBB	1	380,667,375	
		Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan;	0		
		Dukungan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Sekretariat Partai Politik Pencegahan Covid19	0		
	2. Langganan Daya dan Jasa	Telepon dan listrik;	1	293,071,187	
		Air minum Sekretariat;	1	40,260,000	
		Jasa pos dan giro;	0		
		Media cetak dan elektronik;	0		
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip	Penyimpanan data elektronik; Aplikasi Digital	1	35,624,552	
		Penyimpanan data manual;	0		
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Penyimpanan data elektronik;	1	201,455,610	
		Penyimpanan data manual	0		
	SUB TOTAL		8	1,229,180,652	
	TOTAL KESELURUHAN		24	3,883,587,098	
	KELEBIHAN BAYAR DARI KAS PARTAI GOLKAR			49,598	

Jakarta, 9 Januari 2026

Ketua,

AHMED ZAKI ISKANDAR
NPAPG : 367401 053188 0001



Bendahara,

FIRLIE HANGGODO GANINDUTO
NPAPG : 317408 180978 0012

Selain itu, laporan pertanggungjawaban tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor : Ilc/T/LHP/DJPKN-V.JKT/PPD.03/04/2026 tanggal 1 April 2026, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan dana bantuan politik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dinyatakan bahwa tidak ada temuan signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 telah memadai.

KANAL GOLKAR JAKARTA

Website : golkardki.org



Instagram : @golkar.jakarta

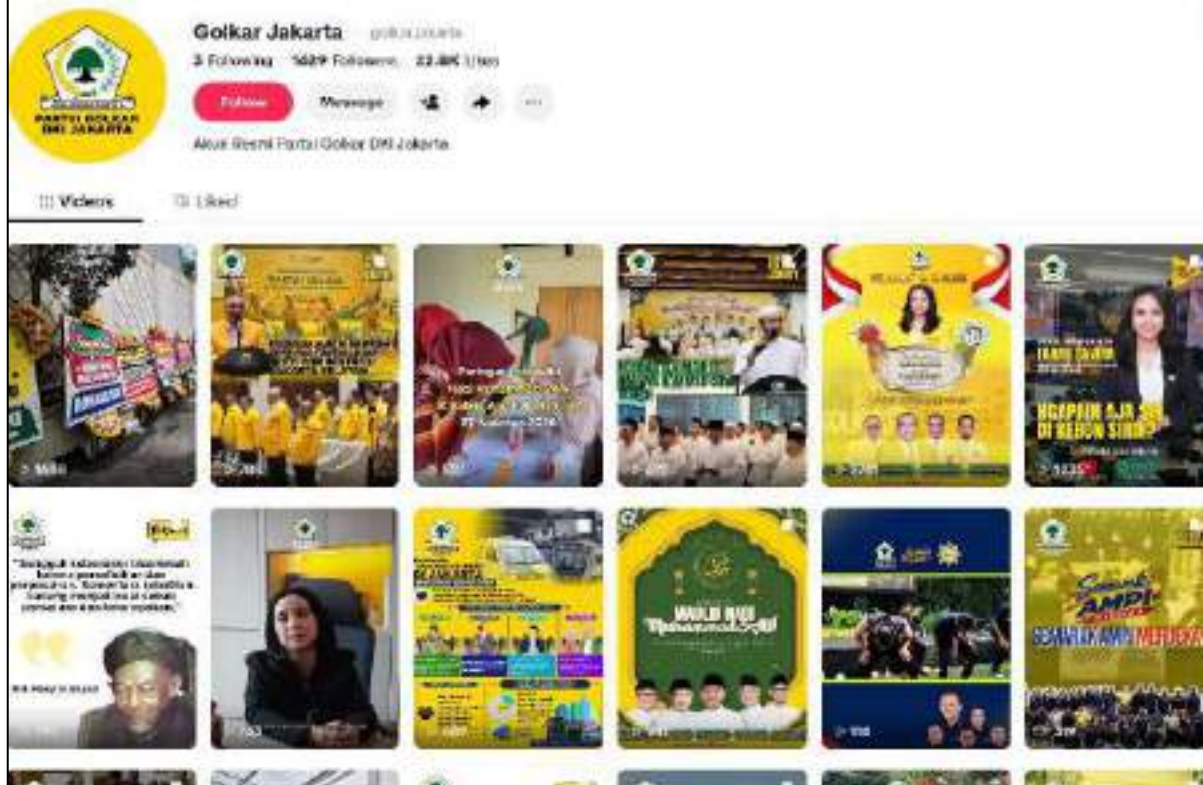




PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PARTAI GOLKAR JAKARTA

Tiktok : @golkar.jakarta



Youtube : @golkar.jakarta



✉ : info@golkarjkt.org

☎ : 0855-855-8585